



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	:	2021 – 2022
Masa Sidang ke-	:	ii (Dua)
Sifat Rapat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	:	1. DPRD Kabupaten Bulukumba, 2. Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKH NK 35+) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur 3. Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah
Hari/Tanggal	:	2 November 2021.
Pukul	:	13.00 – Selesai.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	:	Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Agenda acara	:	1. Penyampaian aspirasi terkait permasalahan GTKH NK 35+ tentang regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman tes PPPK Guru tahun 2021 2. Penyampaian aspirasi terkait penyelesaian Honorer K2 khusus Tenaga Teknis dan Administrasi pada persiapan pembukaan E-Formasi Tahun 2022 3. Konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme penggajian PPPK
Hadir Komisi X DPR RI	:	33 orang dari 52 orang anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	:	1. H. Rijal, S.Sos (Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba) 2. Fahidin (Ketua Komisi 2 DPRD) 3. Hj. Lina Kurniati, S. Pd (Ketua GTKH NK 35+ Provinsi Jawa Barat) 4. Yudha (Ketua GTKH NK 35+ Jawa Timur) 5. Nunik Nugrohaningsih (Ketua PHK21 Korwil Provinsi Jateng)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 13.25. WIB oleh Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHnk 35+) Provinsi Jawa Barat, Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah dan GTKHnk 35+ Jawa Timur serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Komisi X DPR RI mengapresiasi kepada DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHnk 35+) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah yang telah menyampaikan paparan informasi dan aspirasi dengan beberapa poin utama antara lain:

1. DPRD Kabupaten Bulukumba:

- a. Meminta kejelasan dan kepastian pembayaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang anggarannya bersumber dari APBN diperhitungkan melalui DAU dan ditransfer kepada pemerintah daerah.
- b. Memohon agar ada penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hasil seleksi guru PPPK di daerah dan menjadi skala prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam penganggaran tahun anggaran 2022
- c. Menyampaikan terjadinya persoalan di lapangan dalam seleksi penerimaan guru PPPK tahun 2021 seperti patut diduga terjadinya ketidakakuratan perhitungan nilai dalam sistem seleksi guru PPPK.
- d. Meminta agar ada peningkatan afirmasi bagi guru honorer Kategori 2 (afirmasinya hanya 10 %) dan diprioritaskan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- e. Meminta agar ada kebijakan lain sebagai perhatian peningkatan kesejahteraan dan jenjang karir bagi tenaga kependidikan.

2. GTKHnk 35+ Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur:

- a. Memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi dalam seleksi guru PPPK.
- b. Memohon adanya penambahan kuota dan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan dalam seleksi guru PPPK.
- c. Memohon adanya kebijakan afirmasi masa pengabdian pada seleksi guru PPPK dengan cara di-*grade* dari 3-5 tahun masa kerja, 5-10 tahun masa kerja, 10-15 masa kerja dan 15 tahun – ke atas untuk masa kerja.
- d. Memohon untuk seleksi guru PPPK tahap kedua ditunda, sebelum permasalahan seleksi guru PPPK di tahap pertama terselesaikan.
- e. Meminta agar mengangkat seluruh peserta Tes ASN-PPPK Guru tahap 1 Tahun 2021 yang sudah memenuhi *Passing Grade* tetapi terkendala sistem ranking serta formasi.
- f. Meminta agar ada penambahan formasi untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI), guru bidang bahasa Inggris dan bahasa daerah

- g. Memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN
- h. Memohon mempertimbangkan linearitas yang menguntungkan semua honorer

3. PHK21 Korwil Jawa Tengah:

- a. Memohon kepada pemerintah dan DPR RI melakukan revisi UU Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 131 A untuk penyelesaian pengangkatan Tenaga Honorer K2 Menjadi ASN / PNS.
 - b. Menyampaikan belum adanya formasi pengangkatan bagi Tenaga kependidikan sesuai dengan surat edaran KemenPAN RB RI nomor surat B/1551/S.SM.01.00/2021 tentang Pengusulan Kembali Kebutuhan ASN Tahun 2022.
 - c. Memohon agar kebijakan afirmasi disesuaikan dengan masa kerja bukan dengan berdasarkan usia.
 - d. Memohon kualifikasi tenaga kependidikan sesuai database yang telah diverifikasi dan sudah disampaikan kepada BKN dan KemenPAN RB (SMP dan SMU)
- B. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan DPRD Kabupaten Bulukumba, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNC 35+) Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta Perkumpulan Honorer Kategori II Indonesia (PHK21) Korwil Jawa Tengah kepada Pemerintah (Bappenas RI, Kemendikbudristek RI, Kemenag RI, KemenPAN RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI) agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
- C. Bahan aspirasi yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi X DPR RI dengan Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.10 WIB

KETUA RAPAT,



SYAIFUL HUDA
(Ketua Komisi X DPR RI)